PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK DALAM KOMITMEN KEBERLANJUTAN: AKTIVITAS HULU MIGAS PETROCHINA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Nafa Zahratul Ulfah
NPP.33.0206
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nafazahratululfah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, S.IP., MPA
Email: fadhli@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): (*Upstream oil and gas activities conducted by Petrochina International Jabung in Tanjung Jabung Timur Regency have generated environmental degradation including pollution, social conflicts, and ecosystem deterioration, while the Corporate Social Responsibility (CSR) and Environmental Social Responsibility (ESR) programs implemented by the company have not been explicitly directed as a substantive ecological rehabilitation mechanism. Meanwhile, environmental sustainability commitment remains a legal obligation of the company as mandated by Law No. 40 of 2007 and Regional Regulation of Tanjung Jabung Timur Regency No. 13 of 2013.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the implementation of sustainability commitment programs in the political ecology aspect and their impact on environmental sustainability in the upstream oil and gas sector of Petrochina International Jabung, Tanjung Jabung Timur Regency.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through field observation, in-depth interviews with 5 informants, and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman referring to the Political Ecology theoretical framework by (Watts, 2000).* ***Result:*** *The findings indicate that Petrochina's sustainability commitment shows varying levels of implementation across each political ecology dimension. In the access dimension, CSR programs are equally open across six sectors with the community acting as active partners, evidenced by the clean water pipeline in Sinar Wajo Village and a literacy workshop addressing a 12–15% illiteracy rate. In the control dimension, the oversight mechanism operates systematically through three foundations namely the Environmental Impact Assessment (AMDAL), social mapping, and the Regent's proposal validated by SKK Migas, although the involvement of the Environmental Agency remains limited to receiving reports. In the natural resources dimension, 95% of air quality parameters in Pandan Jaya and Pandan Makmur Villages remain below environmental quality standards, peatland revegetation successfully covered 70% of the land, yet the environmental budget allocation remains disproportionate compared to physical infrastructure.* ***Conclusion****: This study concludes that Petrochina's sustainability commitment programs have supported environmental rehabilitation and sustainability, although government oversight needs to be strengthened. The recommendations of this study include allocating a minimum of 30% of CSR funds for environmental programs, directly involving the Environmental Agency in field*

monitoring, and integrating the Triple Bottom Line approach for long-term mitigation of oil and gas impacts.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Sustainability, Political Ecology, Sustainability Commitment, Upstream Oil and Gas*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivitas hulu migas Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran, konflik sosial, dan degradasi ekosistem, sementara program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dijalankan perusahaan belum secara eksplisit diarahkan sebagai mekanisme rehabilitasi ekologis yang substantif, padahal komitmen keberlanjutan lingkungan merupakan kewajiban hukum perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2013. **Tujuan:** Untuk menganalisis pelaksanaan program komitmen keberlanjutan dalam aspek ekologi politik pada sektor hulu migas Petrochina International Jabung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 5 informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka teori (Watts, 2000). **Hasil/Temuan:** Komitmen keberlanjutan Petrochina memiliki tingkat implementasi yang bervariasi pada setiap dimensi ekologi politik. Pada dimensi akses, program CSR terbuka merata di enam bidang dengan masyarakat berperan sebagai mitra aktif, dibuktikan melalui pipanisasi air bersih Desa Sinar Wajo dan sanggar literasi yang mengatasi buta huruf 12–15%. Pada dimensi kontrol, mekanisme pengawasan berjalan sistematis melalui tiga fondasi yakni AMDAL, pemetaan sosial, dan usulan Bupati yang divalidasi SKK Migas, meskipun keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas pada penerimaan laporan administratif. Pada dimensi sumber daya alam, 95% parameter kualitas udara di Desa Pandan Jaya dan Pandan Makmur berada di bawah baku mutu lingkungan dan revegetasi gambut berhasil menutup 70% lahan, namun alokasi anggaran lingkungan masih tidak seimbang dibandingkan infrastruktur fisik. **Kesimpulan:** Program komitmen keberlanjutan Petrochina telah mendukung rehabilitasi dan keberlanjutan lingkungan meskipun pengawasan pemerintah perlu diperkuat. Penelitian ini menyarankan mengalokasikan minimal 30% dana CSR untuk program lingkungan, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup secara langsung dalam monitoring lapangan, serta mengintegrasikan pendekatan Triple Bottom Line untuk mitigasi dampak migas jangka panjang.

Kata Kunci: Ekologi Politik, Hulu Migas, Keberlanjutan Lingkungan, Komitmen Keberlanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas industri ekstraktif merupakan salah satu persoalan mendasar yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Secara umum, eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan mekanisme rehabilitasi ekologis yang memadai berdampak pada kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan marginalisasi komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan laporan (World Bank, 2023), Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara, namun sekaligus menghadapi tantangan serius dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas sektor energi yang terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya komitmen keberlanjutan yang lebih kuat dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas, tidak hanya sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar wilayah operasi.

Sektor hulu minyak dan gas bumi secara inheren menghasilkan eksternalitas negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup, mulai dari emisi gas rumah kaca, pencemaran tanah dan air, hingga degradasi ekosistem lahan gambut dan kawasan pesisir yang bersifat ireversibel apabila tidak ditangani secara serius. Penelitian (Idemudia, 2010) yang dipublikasikan dalam *Journal of Business Ethics* menemukan bahwa program CSR perusahaan migas di negara-negara berkembang seringkali lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi korporasi daripada sebagai mekanisme rehabilitasi ekologis yang substantif, sehingga dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan tidak tertangani secara optimal. Sementara itu, (Frynas, 2005) dalam *Third World Quarterly* menegaskan bahwa kegagalan program CSR sektor migas dalam mengatasi persoalan lingkungan di negara berkembang disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah, ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara korporasi dan komunitas lokal, serta absennya mekanisme akuntabilitas yang transparan dan partisipatif. Kondisi ini menempatkan ekologi politik sebagai kerangka analitis yang relevan dalam membedah kompleksitas hubungan antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemerintah pada dasarnya adalah suatu organisasi atau institusi yang berwenang menetapkan dan melaksanakan peraturan serta undang-undang di suatu wilayahi (Nurdin, 2017). Paradigma baru dalam ilmu pemerintahan dikonstruksikan dengan bertumpu pada dimensi kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu rangkaian sistematis yang saling berkaitan dan memiliki ketergantungan satu sama lain (Labolo, 2023). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua, menghadapi dilema besar antara kebutuhan eksploitasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keharusan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi aktivitas hulu migas yang tinggi, di mana Petrochina International Jabung telah beroperasi selama puluhan tahun dan menjadi salah satu kontributor utama produksi migas nasional. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2024), wilayah operasi Petrochina mencakup kawasan ekologis yang sensitif termasuk lahan gambut tropis dan kawasan pesisir mangrove yang memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyerap karbon dan penopang keanekaragaman hayati. Penelitian Hajer (2005) dalam *Journal of Environmental Policy and Planning* menunjukkan bahwa kawasan gambut tropis di Asia Tenggara merupakan salah satu ekosistem paling rentan terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan dan rehabilitasi yang lebih ketat dan berbasis bukti ilmiah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan tanggung jawab sosial lingkungan, Petrochina International Jabung menyelenggarakan program CSR dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang mencakup enam bidang utama yakni lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, dan infrastruktur di wilayah Ring 1 operasinya. Program tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013. Meskipun demikian, program CSR dan TJSL yang dijalankan

perusahaan belum secara eksplisit diposisikan sebagai mekanisme rehabilitasi ekologis yang substantif dan terstruktur, sebagaimana diindikasikan oleh munculnya berbagai persoalan lingkungan seperti degradasi lahan gambut, pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur akibat mobilisasi kendaraan berat, serta konflik sosial-ekologis yang tercermin dalam aksi demonstrasi Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) pada Januari 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen keberlanjutan yang dinyatakan oleh perusahaan dan dampak ekologis yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan.

Ekologi politik sebagai kerangka analitis menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan kondisi lingkungan hidup dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. (Watts, 2000) dalam teori ekologi politiknya menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi dimensi akses, kontrol, dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai tiga pilar analisis utama. Neumann (2014) dalam *Making Political Ecology* memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa degradasi lingkungan di negara-negara berkembang seringkali merupakan produk dari ketimpangan kekuasaan yang sistemik antara korporasi multinasional, negara, dan komunitas lokal dalam memperebutkan akses dan kontrol atas sumber daya alam. Sullivan (2024) dalam *Oil* yang diterbitkan oleh Polity Press menegaskan bahwa industri minyak dan gas bumi merupakan arena ekologi politik yang paling kompleks karena melibatkan kepentingan ekonomi global, kedaulatan negara, dan hak-hak komunitas lokal secara bersamaan dalam satu ruang geografis yang sama. Berdasarkan kerangka teoretis dan kondisi empiris tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan program komitmen keberlanjutan Petrochina International Jabung melalui perspektif ekologi politik (Watts, 2000), guna memberikan gambaran ilmiah yang komprehensif mengenai sejauh mana program tersebut mampu berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan ekologis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada sektor industri ekstraktif telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Tsamara (2018)dalam penelitiannya terhadap PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik, Huda (2019) yang mengkaji *Joint Operating Body* Pertamina Petrochina East Java, serta Ningtyas (2022) yang meneliti PT Aneka Tambang Sulawesi Tenggara, secara umum hanya menganalisis implementasi program CSR dari perspektif sosial dan ekonomi tanpa mengintegrasikan dimensi lingkungan hidup sebagai fokus analisis utama. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut tidak menggunakan kerangka teori ekologi politik sebagai instrumen analitis dalam mengurai relasi kekuasaan antara korporasi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian Apriliani (2024) yang mengkaji komunikasi CSR multikultural dalam mencapai keberlanjutan lingkungan, meskipun secara tematik lebih relevan dengan penelitian ini, masih terdapat keterbatasan dari sisi metodologis karena hanya bertumpu pada data sekunder sehingga kurang mampu mengeksplorasi secara mendalam perspektif empiris penerima manfaat di lapangan. Di samping itu, penelitian tersebut tidak mengoperasionalisasikan dimensi akses, kontrol, dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai indikator keberlanjutan ekologis yang terukur sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Watts (2000) dalam teori ekologi politik.

Secara empiris, aktivitas hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbukti menimbulkan eksternalitas negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup, yang mencakup degradasi ekosistem,

pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur akibat intensitas mobilisasi kendaraan berat, hingga konflik sosial-ekologis sebagaimana tercermin dalam aksi demonstrasi Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) pada Januari 2025. Kendati demikian, program CSR dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang diselenggarakan oleh perusahaan belum secara eksplisit diposisikan sebagai mekanisme rehabilitasi ekologis yang substantif dan terstruktur. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan ilmiah yang mendasar, yakni apakah program tersebut secara fungsional berperan sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang nyata, ataukah semata-mata berfungsi sebagai legitimasi simbolis atas keberlangsungan praktik eksploitasi sumber daya alam.

Berdasarkan kesenjangan teoretis dan empiris sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengaplikasikan perspektif ekologi politik Watts (2000)melalui tiga dimensi analitis, yaitu akses, kontrol, dan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana program komitmen keberlanjutan yang dilaksanakan oleh Petrochina International Jabung mampu memitigasi dampak lingkungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan ekologis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai suatu kontribusi nyata yang belum ditemukan dalam literatur penelitian sebelumnya pada konteks yang serupa.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus menggunakan tiga dimensi ekologi politik (Watts, 2000) yakni akses, kontrol, dan sumber daya alam sebagai alat analisis dalam menilai keberhasilan program CSR dan TJSL perusahaan migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah yang penting dalam bidang ilmu politik pemerintahan. Selain itu, berbagai permasalahan lingkungan yang terus berkembang seperti kerusakan lahan gambut, pencemaran lingkungan, ancaman kebocoran pipa di wilayah permukiman warga, serta meningkatnya konflik antara masyarakat dan perusahaan menunjukkan bahwa program CSR dan TJSL yang telah berjalan selama ini belum mampu menjawab kebutuhan pemulihan lingkungan secara menyeluruh, sehingga diperlukan kajian ilmiah yang mendalam dan didukung oleh data nyata di lapangan sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan perusahaan akan kekurangan data dan fakta yang cukup untuk menyusun kebijakan dan program CSR yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, sehingga upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berisiko tidak berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konteks keberlanjutan lingkungan hidup pada sektor industri ekstraktif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian CSR dan ekologi politik memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Huda mengkaji implementasi CSR perusahaan migas dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat di Tuban menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi implementasi kebijakan, yang berfokus pada masyarakat sekitar wilayah operasi *Joint Operating Body* Pertamina Petrochina East Java sebagai objek penelitian (Huda, 2019). (Ibrohim, 2024) meneliti implementasi program CSR PT Pertamina RU VI Balongan dalam pengelolaan ekowisata mangrove menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan implementasi kebijakan CSR berbasis lingkungan, dengan objek pengelolaan

ekosistem mangrove di Desa Karangsong (Ekasanti Sidabalok et al., 2026a). Penelitian Ningtyas, Kambolong, dan Makmur membahas implementasi CSR pada PT Aneka Tambang Sulawesi Tenggara menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan *Good Mining Practice*, yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan tambang (Ningtyas et al., 2022). Selanjutnya, Apriliani, Cassana, dan Ummah mengkaji komunikasi CSR multikultural untuk mencapai keberlanjutan lingkungan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komunikasi CSR simetris berbasis media sosial, dengan objek program *Permata Hijau Pesisir Gambut* (Apriliani et al., 2024). Adapun (Evandy, 2026) meneliti analisis dampak konflik lahan terhadap masyarakat adat Sihaporas dalam perspektif ekologi politik menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan objek konflik antara masyarakat adat, perusahaan PT Toba Pulp Lestari, dan negara dalam penguasaan sumber daya agrarian (Ekasanti Sidabalok, 2026). Meilinda dkk mengkaji ekologi politik dalam pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekologi politik dan analisis diskursus, dengan objek konflik pengelolaan lahan antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas lokal (Meilinda et al., 2025).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoretis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan teori ekologi politik Watts (2000) melalui tiga dimensi yakni akses, kontrol, dan sumber daya alam, sebagai kerangka analitis yang secara spesifik diaplikasikan untuk mengevaluasi program komitmen keberlanjutan perusahaan migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian, yakni menganalisis program komitmen keberlanjutan berupa CSR dan TJSL pada sektor hulu minyak dan gas bumi yang secara spesifik dilaksanakan oleh Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, suatu wilayah yang memiliki karakteristik ekologis unik berupa dominasi lahan gambut dan kawasan pesisir yang rentan terhadap dampak aktivitas eksploitasi. Hal ini berbeda dengan penelitian (Huda, 2019) yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, (Tsamara et al., 2018) yang berfokus pada program kemitraan dan bina lingkungan sesuai regulasi Indonesia, serta (Ningtyas, 2022) yang berfokus pada aspek ekonomi dan sosial perusahaan tambang, di mana ketiganya tidak menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai fokus analisis utama. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian (Apriliani et al., 2024) yang hanya mengandalkan data sekunder, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus yang didukung oleh data primer hasil observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan lima informan terpilih, serta dokumentasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Petrochina. Adapun kebaruan yang paling substansial terletak pada penggunaan kerangka teori ekologi politik (Watts, 2000) yang mengoperasionalisasikan tiga dimensi analitis yakni akses, kontrol, dan sumber daya alam, sebagai instrumen analitis dalam mengevaluasi efektivitas implementasi program CSR dan TJSL pada sektor hulu minyak dan gas bumi, di mana aplikasi kerangka teoretis tersebut belum pernah dioperasionalisasikan oleh penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks yang serupa, sehingga penelitian ini menghasilkan temuan ilmiah yang bersifat baru dan secara substansial memperluas dan memperdalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekologi politik terapan sekaligus memberikan sumbangsih konseptual yang bermakna bagi pengembangan kajian ilmu

politik pemerintahan, khususnya dalam menganalisis relasi kekuasaan antara korporasi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program komitmen keberlanjutan dalam aspek ekologi politik pada aktivitas hulu minyak dan gas bumi Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yaitu pendekatan penelitian yang berupaya menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan (Sugiyono, 2021). Paradigma postpositivisme memusatkan perhatian pada suatu fenomena yang bersifat tunggal, meskipun peneliti belum tentu mampu menemukan kelemahan secara mutlak dalam menentukan permasalahan yang dikaji. Pengukuran terhadap fenomena tersebut tidak dapat dilakukan secara pasti, melainkan hanya dapat diperkirakan, namun demikian masih dapat dibangun dan dijelaskan melalui proses penelitian ilmiah serta analisis statistik. Selain itu, interaksi antara peneliti dan subjek penelitian perlu dijaga dalam batas-batas tertentu, sementara keabsahan data ditentukan oleh penilaian internal komunitas akademik dan bukan oleh partisipan penelitian itu sendiri (Mutia Rahmah, 2024) .Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan program komitmen keberlanjutan Petrochina secara faktual, tetapi juga memahami secara mendalam dinamika relasi kekuasaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di wilayah operasi hulu migas. Pelaksanaan pembangunan di kawasan pedesaan memegang peranan yang sangat krusial, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di wilayah perdesaan (Raharjanto, 2024). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena ekologi politik yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program CSR dan TJSL serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah operasi Petrochina. Informan tersebut terdiri dari perwakilan Petrochina International Jabung sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program komitmen keberlanjutan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai otoritas pengawas lingkungan, perwakilan DPMPTSP, penyuluh pertanian lapangan, serta kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai penerima manfaat dan pihak yang merasakan dampak langsung aktivitas operasional perusahaan. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari sisi korporasi, pemerintah, dan masyarakat sekaligus.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi (Sartika, 2018), sumber dengan membandingkan informasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi. Member check juga dilakukan kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara

sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori ekologi politik (Watts, 2000) yang mencakup tiga dimensi analitis yakni akses, kontrol, dan sumber daya alam, sebagai panduan dalam membaca dan memaknai temuan penelitian secara kritis dan sistematis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu wilayah Ring 1 operasi hulu migas Petrochina International Jabung. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi resmi dari perusahaan dan instansi pemerintah terkait. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan program komitmen keberlanjutan secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika lingkungan yang sedang berlangsung di wilayah operasi perusahaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis pelaksanaan program komitmen keberlanjutan dalam aspek ekologi politik pada aktivitas hulu minyak dan gas bumi Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan kerangka teori ekologi politik (Watts, 2000) yang menyatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu akses, kontrol, dan sumber daya alam. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Akses Ekologi Politik

Dimensi akses dalam ekologi politik merujuk pada kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam serta program-program yang diselenggarakan oleh perusahaan di wilayah operasinya (Watts, 2000). Dalam konteks penelitian ini, akses dimaknai sebagai sejauh mana masyarakat di wilayah Ring 1 operasi Petrochina dapat menjangkau dan merasakan manfaat nyata dari program CSR dan TJSL yang dilaksanakan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Petrochina International Jabung, diketahui bahwa program CSR tahun 2024 mencakup enam bidang utama yang didistribusikan secara merata kepada masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Sebaran program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Sebaran Program CSR Petrochina International Jabung Tahun 2024

No	Bidang Program	Kegiatan CSR 2024	Wilayah Sasaran
1	Lingkungan	Revegetasi gambut, penanaman mangrove	Desa Jati Mulyo, kawasan pesisir
2	Pendidikan	Sanggar belajar, beasiswa	Wilayah Ring 1
3	Kesehatan	Posyandu, pengobatan gratis	Wilayah Ring 1
4	Ekonomi	Pelatihan UMKM, bantuan modal	Wilayah Ring 1
5	Kebencanaan	Pelatihan tanggap bencana, logistik	Wilayah Ring 1
6	Infrastruktur	Jalan rigid beton, pipanisasi air bersih	Desa Sinar Wajo, Pandan Jaya

Sumber: Dokumentasi Petrochina International Jabung, 2024

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari pihak Petrochina yang menyatakan bahwa *"program CSR kami dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Ring 1, mulai dari kebutuhan dasar seperti air bersih hingga*

pengembangan ekonomi dan pendidikan." Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya jaringan pipanisasi air bersih di Desa Sinar Wajo yang dibangun oleh Petrochina dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Selain itu, hasil dokumentasi resmi Petrochina menunjukkan bahwa program sanggar belajar berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami buta huruf sebesar 12–15%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.
Capaian Program CSR Petrochina Bidang Pendidikan dan Lingkungan Tahun 2024

No	Program	Target	Capaian	Persentase
1	Pengurangan buta huruf	15%	12–15% tertangani	80–100%
2	Penanaman pohon bakau	30.000 pohon	30.000 pohon	100%
3	Revegetasi lahan gambut	100% lahan	70% lahan tertutup vegetasi	70%
4	Pipanisasi air bersih	1 jaringan/desa	Terbangun di Desa Sinar Wajo	100%

Sumber: Dokumentasi Petrochina International Jabung dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Temuan ini mengindikasikan bahwa pola akses yang dibangun melalui program CSR Petrochina telah menggeser posisi masyarakat dari penerima pasif menjadi mitra aktif dalam pengelolaan programani (Isabella & Martini, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi akses dalam program komitmen keberlanjutan Petrochina telah berjalan dengan cukup baik, meskipun pemerataan akses antarwilayah Ring 1 masih perlu ditingkatkan secara konsisten.

3.2 Kontrol Ekologi Politik

Dimensi kontrol dalam ekologi politik merujuk pada mekanisme pengawasan dan otoritas yang dimiliki oleh berbagai aktor dalam mengatur pelaksanaan dan distribusi manfaat dari program pengelolaan sumber daya alam (Watts, 2000). Dalam konteks penelitian ini, kontrol dimaknai sebagai sejauh mana mekanisme pengawasan program CSR dan TJSL Petrochina berjalan secara efektif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mekanisme kontrol program CSR Petrochina berjalan melalui tiga fondasi utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.
Mekanisme Kontrol Program CSR Petrochina International Jabung Berdasrkan Hasil Observasi

No	Fondasi Kontrol	Pelaksana	Keterangan
1	Dokumen AMDAL	Petrochina & DLH	Dasar legalitas operasional dan lingkungan
2	Pemetaan sosial wilayah Ring 1	Petrochina	Basis perencanaan program CSR
3	Usulan resmi Bupati	Pemda & SKK Migas	Disampaikan setiap tahun, divalidasi bersama Bappeda dan SKPD
4	Monitoring internal	Petrochina & SKK Migas	Terakhir dilaksanakan Desember 2025
5	Pelaporan kepada DLH	Petrochina	Bersifat administratif, DLH tidak turun lapangan

Sumber: Hasil wawancara mendalam, 2025

Informan dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"kami menerima laporan pelaksanaan program dari Petrochina secara berkala, namun keterlibatan kami dalam monitoring langsung di lapangan masih terbatas."* Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kontrol antara aktor korporasi dan aktor pemerintah dalam pengawasan program keberlanjutan lingkungan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.
Perbandingan Tingkat Keterlibatan Aktor dalam Pengawasan Program CSR Berdasarkan Hari Hasil Observasi dan Wawancara

No	Aktor	Bentuk Keterlibatan	Tingkat Keterlibatan
1	Petrochina International Jabung	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring internal	Tinggi
2	SKK Migas	Validasi dan monitoring bersama	Tinggi
3	Bupati/Pemda	Usulan program tahunan	Sedang
4	Bappeda & SKPD	Validasi program	Sedang
5	Dinas Lingkungan Hidup	Penerimaan laporan administratif	Rendah
6	Masyarakat/Tokoh Desa	Penerima manfaat dan usulan kebutuhan	Rendah–Sedang

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, 2025

Dengan demikian, dimensi kontrol dalam program komitmen keberlanjutan Petrochina dinilai belum optimal, mengingat keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai otoritas pengawas lingkungan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pengawasan substantif di lapangan.

3.3 Sumber Daya Alam Ekologi Politik

Dimensi sumber daya alam dalam ekologi politik merujuk pada kondisi aktual sumber daya alam di wilayah operasi industri ekstraktif, mencakup kualitas lingkungan hidup, upaya rehabilitasi ekosistem, serta dampak nyata yang ditimbulkan oleh aktivitas eksploitasi terhadap keberlanjutan lingkungan (Watts, 2000). Dalam konteks penelitian ini, dimensi sumber daya alam dimaknai sebagai sejauh mana program komitmen keberlanjutan Petrochina mampu menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan hidup di wilayah operasinya.

Berdasarkan data kualitas lingkungan tahun 2023–2025 yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil pengukuran parameter lingkungan di Desa Pandan Jaya dan Desa Pandan Makmur tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.
Data Kualitas Udara di Wilayah Operasi Petrochina Tahun 2023–2025

No	Parameter	Baku Mutu	2023	2024	2025	Keterangan
1	CO (Karbon Monoksida)	10.000 µg/m³	850 µg/m³	720 µg/m³	610 µg/m³	Menurun, di bawah baku mutu
2	SO_2 (Sulfur Dioksida)	365 µg/m³	120 µg/m³	115 µg/m³	110 µg/m³	Stabil, di bawah baku mutu
3	NO_2 (Nitrogen Dioksida)	150 µg/m³	45 µg/m³	42 µg/m³	40 µg/m³	Stabil, di bawah baku mutu
4	Kebisingan	55 dB	48 dB	47 dB	46 dB	Di bawah baku mutu

No	Parameter	Baku Mutu	2023	2024	2025	Keterangan
5	Kebauan	Standar nasional	Normal	Normal	Normal	Tidak melebihi ambang batas

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023–2025

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"secara umum kualitas udara di wilayah operasi Petrochina masih terpantau dalam batas normal, bahkan terdapat perbaikan kadar CO di Desa Pandan Jaya yang kami kaitkan dengan pembangunan jalan rigid beton yang menekan emisi kendaraan operasional."* Selain kualitas udara, kondisi rehabilitasi ekosistem juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6.
Capaian Program Rehabilitasi Ekosistem Petrochina Tahun 2024

No	Program Rehabilitasi	Lokasi	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Revegetasi lahan gambut	Desa Jati Mulyo	100% lahan	70% lahan tertutup vegetasi	70%
2	Penanaman pohon bakau	Kawasan pesisir	30.000 pohon	30.000 pohon	100%
3	Pembangunan jalan rigid beton	Desa Pandan Jaya	Per ruas jalan	Terselesaikan	100%
4	Pipanisasi air bersih	Desa Sinar Wajo	1 jaringan	Terbangun & beroperasi	100%

Sumber: Dokumentasi Petrochina International Jabung dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Namun demikian, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa alokasi anggaran CSR untuk program lingkungan masih tidak proporsional dibandingkan dengan belanja infrastruktur fisik. Ketimpangan alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.
Perbandingan Alokasi Anggaran CSR Petrochina Berdasarkan Kategori Program Tahun 2024

No	Kategori Program	Estimasi Anggaran	Proporsi
1	Infrastruktur fisik (jalan rigid beton)	Rp7.000.000.000 – Rp8.000.000.000/km	Dominan
2	Penanaman mangrove	Relatif lebih rendah	Minoritas
3	Revegetasi gambut	Relatif lebih rendah	Minoritas
4	Pendidikan dan kesehatan	Relatif lebih rendah	Minoritas

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan dokumentasi, 2025

Ketimpangan alokasi anggaran tersebut mengindikasikan bahwa program rehabilitasi ekologis yang secara biaya lebih efisien namun berdampak lebih luas bagi pemulihan lingkungan belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai. Dengan demikian, dimensi sumber daya alam dalam program komitmen keberlanjutan Petrochina menunjukkan hasil yang positif dari sisi kualitas lingkungan hidup, namun masih memerlukan perbaikan struktural dalam hal proporsi alokasi anggaran antara pembangunan infrastruktur fisik dan program

rehabilitasi ekologis yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada pemulihan ekosistem jangka panjang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program komitmen keberlanjutan Petrochina International Jabung memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap rehabilitasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ring 1 operasi hulu migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peneliti menemukan temuan penting yakni program CSR dan TJSL Petrochina telah mampu menggeser posisi masyarakat dari penerima pasif menjadi mitra aktif dalam pengelolaan program, sebagaimana tercermin dari keberhasilan program pipanisasi air bersih di Desa Sinar Wajo, revegetasi gambut yang mencapai 70% tutupan vegetasi di Desa Jati Mulyo, serta penanaman 30.000 pohon bakau yang berjalan sesuai target nasional. Namun demikian, ketimpangan alokasi anggaran antara infrastruktur fisik dan program rehabilitasi ekologis, serta lemahnya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lapangan, menjadi catatan kritis yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sama halnya dengan temuan penelitian Ningtyas, Kambolong, dan Makmur (2022) bahwa implementasi CSR pada perusahaan industri ekstraktif melalui pendekatan *Good Mining Practice* terbukti memberikan kontribusi positif dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa program CSR Petrochina yang dijalankan secara terstruktur melalui enam bidang program telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasinya. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Ningtyas, Kambolong, dan Makmur karena menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan perusahaan ekstraktif yang dijalankan secara konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan dampak ekologis dan sosial yang positif, meskipun dengan karakteristik objek penelitian yang berbeda yakni sektor migas dibandingkan sektor pertambangan mineral.

Berbeda dengan temuan penelitian Huda (2019) yang menyimpulkan bahwa program CSR perusahaan migas dinilai tidak efektif akibat kurangnya keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan rendahnya transparansi pelaksanaan, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa program CSR Petrochina International Jabung telah berjalan dengan mekanisme perencanaan yang lebih sistematis melalui tiga fondasi yakni dokumen AMDAL, pemetaan sosial wilayah Ring 1, dan usulan resmi Bupati yang divalidasi bersama SKK Migas, Bappeda, dan SKPD terkait. Perbedaan temuan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana Petrochina International Jabung beroperasi dalam kerangka regulasi SKK Migas yang lebih ketat dan terstruktur dibandingkan konteks operasional yang dikaji oleh Huda, sehingga mekanisme koordinasi kelembagaan dalam perencanaan program CSR berjalan lebih tertib secara administratif. Sama halnya dengan temuan penelitian (Ibrohim, 2024) bahwa implementasi CSR PT Pertamina RU VI Balongan dalam pengelolaan ekowisata mangrove memerlukan peningkatan dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi untuk memastikan keberlanjutan program, temuan penelitian ini juga mengidentifikasi persoalan serupa yakni lemahnya keterlibatan aktif Dinas Lingkungan Hidup dalam monitoring lapangan yang berpotensi menghambat keberlanjutan program rehabilitasi ekologis Petrochina dalam jangka panjang. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Ibrahim karena menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek koordinasi kelembagaan dan pengawasan birokrasi merupakan persoalan struktural yang bersifat lintas perusahaan dalam implementasi program CSR sektor migas di Indonesia, terlepas dari perbedaan lokasi dan karakteristik operasional perusahaan.

Berbeda dengan temuan penelitian Apriliani, Cassana, dan Ummah (2024) yang menyimpulkan bahwa program CSR berbasis komunikasi multikultural terbukti efektif dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

efektivitas program keberlanjutan lingkungan tidak semata-mata ditentukan oleh pendekatan komunikasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh proporsi alokasi anggaran yang tepat antara infrastruktur fisik dan intervensi ekologis, serta kekuatan mekanisme pengawasan yang melibatkan otoritas lingkungan hidup secara langsung di lapangan. Temuan ini menolak asumsi penelitian Apriliani, Cassana, dan Ummah yang terlalu menekankan aspek komunikasi sebagai faktor penentu keberhasilan program CSR lingkungan, karena perbedaan karakteristik objek penelitian yakni perusahaan migas dengan kompleksitas dampak ekologis yang jauh lebih besar dibandingkan konteks program CSR pada umumnya memerlukan instrumen evaluasi yang lebih substantif dan berbasis data kualitas lingkungan yang terukur.

Temuan penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian Evandy (2026)yang mengidentifikasi ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat adat, perusahaan, dan negara dalam penguasaan sumber daya agraria melalui perspektif ekologi politik, karena penelitian ini menemukan pola serupa yakni dominasi kontrol korporasi atas program keberlanjutan lingkungan yang belum diimbangi oleh pengawasan pemerintah daerah yang proporsional, sehingga posisi masyarakat lokal dalam relasi kekuasaan pengelolaan sumber daya alam masih relatif lemah. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang memperkaya kajian ekologi politik terapan di Indonesia, khususnya dalam menganalisis relasi kekuasaan antara korporasi migas, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam konteks implementasi program komitmen keberlanjutan lingkungan di wilayah operasi industri ekstraktif.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung keberhasilan program CSR Petrochina yakni mekanisme pengusulan yang terstruktur dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengelola program, sedangkan faktor penghambatnya yakni terbatasnya keterlibatan pemerintah daerah dalam monitoring dan ketimpangan alokasi anggaran yang masih didominasi infrastruktur fisik. Selain itu, pembangunan jalan rigid beton terbukti memberikan dampak ekologis tidak langsung berupa penurunan kadar karbon monoksida, dan program revegetasi gambut berhasil memadukan pemulihan ekosistem dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sinergis.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program komitmen keberlanjutan dalam aspek ekologi politik pada aktivitas hulu minyak dan gas bumi Petrochina International Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan dengan cukup baik, yang tercermin dari terjaganya kualitas udara di wilayah operasi perusahaan dengan 95% parameter berada di bawah baku mutu lingkungan, keberhasilan revegetasi gambut mencapai 70% tutupan vegetasi, serta terpenuhinya target penanaman 30.000 pohon bakau secara konsisten. Selain memerankan mekanisme perencanaan berbasis tiga fondasi yakni AMDAL, pemetaan sosial, dan usulan Bupati sebagai kunci sistematis pelaksanaan program, penelitian ini menambahkan temuan baru bahwa ketimpangan alokasi anggaran antara infrastruktur fisik dan intervensi ekologis serta lemahnya keterlibatan aktif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lapangan menjadi faktor struktural yang berpotensi menghambat keberlanjutan ekologis jangka panjang di wilayah operasi perusahaan. Guna meningkatkan efektivitas program komitmen keberlanjutan lingkungan, disarankan agar Petrochina mengalokasikan minimal 30% dana CSR untuk program lingkungan hidup serta mengintegrasikan pendekatan *Triple Bottom Line* secara konsisten dalam setiap siklus perencanaan program. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga seyogianya mampu memperkuat peran aktif Dinas Lingkungan Hidup dalam monitoring lapangan secara langsung dan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat serta akademisi dalam rangka memastikan program komitmen keberlanjutan

Petrochina benar-benar memberikan dampak rehabilitasi ekologis yang nyata dan terukur bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu dan aksesibilitas data, mengingat aktivitas operasional hulu migas Petrochina International Jabung mencakup wilayah yang luas sehingga observasi lapangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Ring 1. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kelurahan yakni Kelurahan Pandan Jaya sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell, sehingga temuan penelitian belum sepenuhnya dapat merepresentasikan kondisi seluruh wilayah operasi Petrochina di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data anggaran CSR secara rinci dan terperinci dari pihak perusahaan menjadi hambatan dalam menganalisis proporsi alokasi program secara lebih mendalam dan komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih terbatasnya cakupan temuan penelitian ini, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang lebih luas mencakup seluruh wilayah Ring 1 operasi Petrochina International Jabung, atau pada perusahaan migas lainnya yang beroperasi di Provinsi Jambi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi program komitmen keberlanjutan lingkungan pada sektor hulu migas di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* agar dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program CSR secara kuantitatif sekaligus menggali dinamika ekologi politik secara kualitatif secara bersamaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Petrochina International Jabung yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan akses kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian di wilayah operasi perusahaan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan data kualitas lingkungan dan informasi yang sangat berharga bagi kelengkapan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala DPMPTSP, penyuluh pertanian lapangan, kepala desa, serta seluruh tokoh masyarakat di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang jujur dan terbuka demi tercapainya tujuan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, R., Cassana, R. R. B., Ummah, K. R., Ramadhani, D. S., & Alhasanain, N. (2024). Multicultural CSR Communication for Achieving a Sustainable Environment. *Nyimak: Journal of Communication*, *8*(2), 157. https://doi.org/10.31000/nyimak.v8i2.10838

Ekasanti Sidabalok, Y., Pratama, G., & Korespondensi, P. (2026a). Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik: Studi Kasus PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, *4*(1), 29–37. https://doi.org/10.59841/jurai.v2i4.2152

Ekasanti Sidabalok, Y., Pratama, G., & Korespondensi, P. (2026b). Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik: Studi Kasus

PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, *4*(1), 29–37. https://doi.org/10.59581/JHSP-WIDYAKARYA.V4I1.6025

Evandy, Y. E. (2026). Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, *4*, Hal 29-37. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v4i1.6025

Frynas, J. G. (2005). The false developmental promise of Corporate Social Responsibility: evidence from multinational oil companies. *International Affairs*, *81*(3), 581–598. https://doi.org/10.1111/J.1468-2346.2005.00470.X

Hajer, M., planning, W. V.-J. of environmental policy &, & 2005, undefined. (2005). A decade of discourse analysis of environmental politics: Achievements, challenges, perspectives. *Taylor & FrancisM Hajer*, *W VersteegJournal of Environmental Policy & Planning*, *2005•Taylor & Francis*, *7*(3), 175–184. https://doi.org/10.1080/15239080500339646

Huda, M. M. (2019). Implementasi CSR Perusahaan Migas Dalam Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Tuban: (Studi implementasi CSR Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java). *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, *3*(1), 79–92. https://doi.org/10.30762/ASKETIK.V3I1.1311

Ibrohim. (2024). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina RU VI Balongan Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Desa Karangsong. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, *2*(1), 40–52. https://doi.org/10.61166/DEMAGOGI.V2I1.11

Idemudia, U. (2010). Corporate social responsibility and the rentier Nigerian state: Rethinking the role of government and the possibility of corporate social development in the Niger Delta. *Taylor & FrancisU IdemudiaCanadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du*, *2010•Taylor & Francis*, *30*(1–2), 131–151. https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669285

Isabella, K. A., & Martini, A. (2024). Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Daerah Terhadap Kepercayaan Publik di Kabupaten Sintang. *Jurnal Common*, *6*(1), 73–85. https://doi.org/10.34010/COMMON.V6I1.7193

Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Bayumedia Publishing.

Meilinda, S. R., Salman, D., Muhammad, S., Meilinda, S. R., Salman, D., & Muhammad, S. (2025). Conflict and Compromise, Discourse and Action: Political Ecology in the Complexity of Land Management in Central Kalimantan, Indonesia. *Forest and Society*, *9*(2), 422–448. https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.40301

Mutia Rahmah. (2024). *Metodologi Penelitian Terapan* (Vol. 2).

Neumann, R. P. (2014). Making political ecology. *Making Political Ecology*, 1–213. https://doi.org/10.4324/9780203764206

Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Pt. Aneka Tambang Tbk. Ubpn Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, *5*(4), 1091–1112. https://doi.org/10.35817/PUBLICUHO.V5I4.50

Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.

Raharjanto, T. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 1–15.

Sartika, I. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. IPDN Press.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.

Sullivan, S. (2024). On the political ontology of making things up in political ecology critique: An engagement with Bormpoudakis (2019) and Knudsen (2023). *Journal of Political Ecology* , *31*(1), 789–805. https://doi.org/10.2458/JPE.5823

Tsamara, Y. N., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2018). Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Pt Pertamina Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati. *Share : Social Work Journal*, *8*(2), 219–224. https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083

Watts, M. (2000). *Political Ecology*. Routledge.

World Bank. (2023). Indonesia Country Climate and Development Report. In *Indonesia Country Climate and Development Report*. https://doi.org/10.1596/39750